Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia

Siti Musdah Mulia

Pentingnya Kebersamaan dalam Keberagaman

Ada satu hal yang selalu ditekankan oleh Nurcholish Madjid saat bicara tentang kemajemukan Indonesia, yaitu bahwa keanekaragaman suku dan agama yang dimiliki negeri ini bukanlah sesuatu yang layak dibangga-banggakan. Itu tidak unik, apalagi istimewa, dan bukan hanya dimiliki Indonesia.

Mengapa demikian? Sebab adalah sebuah keniscayaan bahwa tidak ada suatu masyarakat pun yang benar-benar tunggal, uniter (*unitary*), tanpa ada unsur-unsur perbedaan di dalamnya. Ada masyarakat yang bersatu, tidak terpecah belah, tetapi keadaan bersatu (*being united*) tidaklah dengan sendirinya berarti kesatuan atau ketunggalan (*unity*) yang mutlak. Persatuan itu dapat terjadi, dan justru kebanyakan terjadi, dalam keadaan berbeda-beda (*unity in diversity, E Pluribus Unum, Bhinneka Tunggal Ika*).

Faktanya memang demikian. Praktis tidak ada masyarakat tanpa pluralitas, khususnya dalam persoalan agama, kecuali di kota-kota eksklusif tertentu saja seperti Vatican, Makkkah, dan Madinah. Bahkan, negeri-negeri Islam Timur Tengah (Dunia Arab), yang *nota bene* dulunya merupakan pusat-pusat agama Kristen dan Yahudi, sampai saat

ini masih mempunyai kelompok-kelompok penting minoritas Kristen dan Yahudi.

Meskipun orang-orang Muslim Arab telah membebaskan negeri-negeri di Timur Tengah sejak awal munculnya Islam, namun sebenarnya mereka hanya mengadakan reformasi politik. Reformasi dimaksud antara lain mengambil bentuk penegasan kebebasan beragama, bukan dalam wujud memaksa penduduk di wilayah tersebut berpindah ke agama Islam. Sebab, hal tersebut diyakini oleh para penyebar Islam masa-masa awal sebagai aktivitas yang bertentangan dengan prinsip agama Islam sendiri.

Menilik fakta-fakta ini, sebenarnya adalah suatu hal yang menggelikan dan sangat mengecewakan bahwa pasca-reformasi, di Indonesia muncul berbagai gerakan yang mengarah pada eksklusifisme umat Islam. Lalu muncul euforia menggagas peraturan dan kebijakan publik bernuansa Islam yang selanjutnya dikenal dengan istilah Perda Syariah. Kabupaten A, misalnya lalu dianggap sebagai kabupaten Islam, maka harus diterapkan berbagai hukum Islam. Bahkan, dijumpai di sejumlah daerah, beberapa desa tanpa segan-segan menyebut dirinya sebagai desa Islami. Bahkan, ditemukan di depan sebuah Balai Desa di Kabupaten Bulukumba tulisan berbunyi: "Maaf tidak melayani tamu wanita yang tidak berjilbab!!!" Muncul pula pernyataan sekelompok warga masyarakat seperti: "Kami adalah Islam, sedang Anda bukan Islam, maka Anda tidak boleh hidup di Indonesia." Karena itu, korbannya pun bergelimpangan: Ahmadiyah, Lia Eden, berbagai aliran lain yang dianggap "sesat" dan terakhir agama Baha'i, hingga muncul kekerasan-kekerasan atas nama agama yang berulang-ulang.

Menguatnya Politik Identitas di Indonesia

Membaca makalah yang disampaikan Buya Syafii Maarif dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture Oktober lalu, terutama berkenaan dengan politik identitas yang muncul di Barat bersanding dengan politik identitas *a la* Indonesia pasca reformasi, cukup jelas diterangkan berbagai tipe politik identitas yang pernah muncul. Di

sini saya ingin mencoba melanjutkan dan mempertegas lagi apa yang disampaikan Buya Syafii, sekaligus memberikan solusi.

Secara geneanologi, sejauh pengamatan dan persentuhan saya selama ini dengan berbagai gerakan Islam di Indonesia, politik identitas yang ada di Barat, terutama pada awal kemunculannya, berbeda dengan yang kita temukan di Indonesia. Di Amerika Serikat misalnya, secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Gerakan feminis yang memperjuangkan kesetaraan gender, gerakan kulit hitam, kelompok homoseksual, dan beberapa gerakan politik identitas lain yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 ini semuanya mengarah pada dorongan untuk memperoleh persamaan hak dan derajat atas kelompok dominan atau mayoritas.

Sementara itu, jika kita menengok ke Tanah Air, politik identitas itu dilakukan oleh kelompok *mainstream,* yaitu kelompok agama mayoritas, dengan niat "menyingkirkan" kaum minoritas yang dianggapnya "menyimpang" atau "menyeleweng". Hebatnya lagi, ini dilakukan bukan hanya oleh kekuatan masyarakat sipil, bahkan juga negara. Kasus terhadap Ahmadiyah yang dari tahun 2006 hingga sekarang menjadi pengungsi di Lombok, Nusa Tenggara Timur, serta dipenjarakannya Lia Aminuddin, Ahmad Mussadeq, dan Yusman Roy adalah contoh-contoh nyata mengenai hal ini.

Arus politik identitas umat Islam, terutama yang digawangi oleh kelompok fundamentalis, paling tidak telah melahirkan tiga bentuk kekerasan. *Pertama*, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan masjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma, maupun terbunuh. *Kedua*, kekerasan simbolik, yang dapat berupa kekerasan semiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah yang bernada melecehkan sesuatu agama. *Ketiga*, kekerasan struktural, yang berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun aparatnya sendiri.[1]

Sebetulnya, fundamentalisme bukan hanya ditemukan dalam Islam, tetapi telah ada lebih dahulu dalam agama Kristen. Apa yang mendorong munculnya fundamentalisme, khususnya Kristen (Katolik dan Protestan)? Adalah modernitas Barat yang mengakibatkan manusia kehilangan identitas, budaya, nilai-nilai, norma, yang berganti menjadi nilai-nilai material, seperti dialami negara dunia ketiga. Krisis identitas keagamaan mendorong terjadinya krisis moral.

Akibat perasaan terancam, seperti dikatakan Houtart,[2] kekerasan ditemukan dengan mudah dalam agama—dan agama dapat dengan mudah menjadi alat (legitimasi) penggunaan kekerasan. Perasaan terancam ini merupakan akibat adanya modernisme yang mengalienasi manusia seperti sekularisasi, liberalisasi dan globalisasi. Menurut dua pakar ilmu sosial, yakni C. Jaggi dan D. Krieger,[3] modernitas dan keberagaman adalah pembawa ancaman di balik keinginan atas adanya kepastian, kebenaran mutlak dan gambaran dunia mapan.

Untuk konteks Indonesia, kalau dicermati secara mendalam, akan terlihat secara historis bahwa kekerasan politik berbasis agama merupakan fenomena khas Orde Baru. Fakta ini terlihat antara lain dari data Thomas Santoso yang menjelaskan bahwa pada masa Orde Lama hampir tidak ada kerusuhan berlatar belakang agama seperti pengrusakan gereja. Pada kurun waktu 1945-1966, hanya terdapat dua gereja yang dirusak, itu pun terjadi di daerah-daerah yang mengalami gejolak politik dan keamanan bertalian dengan gerakan Darul Islam.

---

[1]Lebih rinci, lihat Musdah Mulia, "Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009), hal. 346-348.

[2]Francois Houtart, "The Cult of Violence in the Name of Religion: A Panorama," *Concilium* 4 (1997), hal. 3.

[3]Geiko Muller-Fahrenholz, "What is Fundamentalism Today? Perspectives in Social Psychology," dalam Hans Kung & Jurgen Moltmann (eds.), *Concilium*, Special Issue (1992), hal. 12.

Akan tetapi, pada masa Orde Baru (1966-1998) tercatat tidak kurang dari 456 gereja dirusak, ditutup maupun diresolusi.[4] Kebijakan Orde Baru yang represif dengan pendekatan penyeragaman yang kental menimbulkan luapan bom waktu yang meledak tatkala kekuatan Orde Baru runtuh. Ledakan itu di antaranya berbentuk peneguhan kembali identitas-identitas primordial, terutama dalam ranah agama dan etnis. Ini adalah sebab utama dan pertama dari gelombang tsunami politik identitas kemudian.

Faktor penyebab kedua adalah dibukanya kran demokrasi pasca reformasi sehingga membuat hampir semua kelompok keagamaan maupun aliran kepercayaan bersuara, baik itu atas inisiatif sendiri maupun karena didorong oleh pihak-pihak lain. Menurut hasil investigasi *Indonesian Conference Religion and Peace* (ICRP),[5] yang masuk dalam kategori inisiatif sendiri di antaranya adalah umat Konghucu: setelah ditekan pada masa Orde Baru, kini mereka mendapat ruang untuk tampil dan bahkan "dibela" oleh pemerintah, dengan menetapkan agama mereka sebagai agama resmi negara. Kemudian, organisasi seperti Dian Interfidei di Yogjakarta, ICRP di Jakarta, Desantara di Depok, Jawa Barat, dan Percik di Solo secara berkesinambungan membantu pihak-pihak yang selama ini termarjinalkan, bahkan tertindas, baik dari kelompok beragama yang belum diakui negara atau aliran-aliran kepercayaan yang terpinggirkan, untuk bersuara.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam mempengaruhi arus politik identitas terutama di kalangan umat Islam adalah menguatnya fundamentalisme agama. Gelombang Islam transnasional yang membawa paham-paham radikal membuat kelompok-kelompok Islam fundamentalis semakin mengukuhkan dirinya. Mereka lalu tak segan-segan melakukan berbagai manuver untuk "menyingkirkan" semua kelompok yang dianggap berbeda. Munculnya Hizbut Tahrir Indonesia,

---

[4]Thomas Santoso, "Potret Kekerasan Politik- Agama dalam Era Reformasi," makalah dipresentasikan dalam Lokakarya Flienders-FISIPOL UGM, di Yogyakarta, 2000, hal. 2.

[5]*Majemuk*, Edisi 41 November-Desember 2009, hal. 7.

Majelis Mujahidin Indonesia, dan beberapa kelompok sejenis termasuk ke dalam faktor penyebab ini. Dukungan MUI atas gerakan ini semakin memperparah situasi, dengan melahirkan berbagai fatwa yang mendiskreditkan beberapa kelompok yang menurut mereka "menyimpang", hingga berujung berbagai kasus kekerasan.

Politik Identitas vis a vis Pluralisme

Politik identitas yang dibangun dan bermunculan di banyak wilayah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan dua pola, yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Untuk pola yang kedua tampak pada kelompok-kelompok Islam yang mengukuhkan identitasnya dengan menafikan, menyingkirkan, dan memberantas yang lain. Logika seperti ini dikembangkan berdasarkan apa yang disebut Jacques Derrida sebagai prinsip "oposisi biner" atau Michel Foucault sebagai "logika strategis" seperti modern-tradisional, superior-inferior, mayoritas-minoritas, Barat-Timur, Islam-kafir (sesat).

Menarik dicermati, dalam prinsip tersebut, satu istilah mendominasi lainnya. Yang pertama diunggulkan, diandalkan, disanjung-sanjung dan ditakhtakan, sedangkan yang lainnya direndahkan, dipinggirkan, dilecehkan dan disampahkan. Yang satu dianggap sebagai pusat, prinsip dan titik tolak, sedangkan yang lainnya hanya diposisikan sebagai sampingan, marjinal atau pinggiran, bahkan musuh.

Akibatnya, muncul sebutan sesat berulangkali, yang didasarkan kepada kelompok-kelompok yang memiliki tafsir berbeda dari tafsir kelompok fundamentalis. Dalam kerangka menegaskan identitas di tengah pluralitas keagamaan, logika universalitas dan keunikan yang dibangun di atas prinsip oposisi biner atau logika strategis dalam pendekatan atas agama-agama berakibat sangat fatal. Berbagai kasus kekerasan dan pemaksaanlah yang mengemuka.

Dalam kondisi ini, semangat dan praktek pluralisme menemukan urgensinya. Masalahnya, pluralisme terlanjur dianggap barang najis dan dijauhi oleh sebagian masyarakat karena dipandang sebagai produk Barat.

Memang betul, kalau dilihat dari asal-usul namanya, istilah pluralisme datang dari Barat. Akan tetapi, esensi yang dikandungnya dapat dimiliki oleh setiap bangsa yang plural.

Pluralisme mengandung dalam dirinya semangat persaudaraan dan solidaritas yang kokoh di antara sesama manusia. Intinya semangat persaudaraan dan persahabatan yang bisa ditemukan dalam ajaran setiap agama dan budaya, semangat yang sudah ada sejak dulu kala. Ia seperti Bhinneka Tunggal Ika, yang lahir untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Tantangan dan Solusi

Tantangan ke depan adalah bagaimana kita dapat menerapkan pluralisme berdampingan dengan politik identitas pada sebuah negara yang masih dalam proses pematangan "modernitas" dan demokrasi yang terengah-engah seperti Indonesia. Inilah yang saya dan banyak lakukan selama ini, bagaimana membuat jembatan penghubung, bukan hanya dalam wacana, tetapi juga gerakan praksis di lapangan dengan melakukan dialog, dan upaya lainnya. Meski belum bisa dikatakan berhasil, paling tidak, ada hal penting yang dapat dilakukan segera dan terus menerus.

Pertama, meluruskan pemahaman terhadap istilah pluralisme kepada semua kelompok. Tidak hanya kepada kaum moderat atau progresif, sebagaimana terjadi selama ini, tetapi juga pada kelompok fundamentalis atau Islamis. Terutama terhadap mereka yang dianggap sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Anthropolog Cynthia Mahmood, penulis buku tentang kaum militan Sikh, *Fighting for Faith and Nation: Dialog with Sikh Militants,* suatu saat mengatakan: "Mengundang kelompok-kelompok militan agama dalam proses perdamaian adalah tindakan strategis, terutama ketika identitas keagamaan menjadi akar penyebab utama tindak kekerasan."[6]

---

[6]Sumanto Al-Qurtuby, "Mendesain Kembali Format Dialog Agama," *Kompas*, 8 September 2008.

Mengapa kehadiran kelompok radikal penting? Sebab, apa yang mereka pahami selama ini mengenai pluralisme adalah salah kaprah, misalnya tampak pada fatwa MUI tahun 2005, yang mengharamkan pluralisme. Dalam konteks fatwa itu, pluralisme dianggap identik dengan nihilisme dan sinkretisme. Kedua istilah yang disebutkan terakhir ini jelas mengandung makna yang sangat berbeda dengan istilah pluralisme.

Pluralisme bukan nihilisme atau pun sinkretisme. Pluralisme tidak berarti seseorang harus menanggalkan identitas keagamaan dan komitmennya terhadap agama tertentu. Pluralisme intinya adalah perjumpaan komitmen untuk membangun hubungan sinergis satu dengan yang lain. Karena itu, fakta pluralitas tersebut baru dianggap berguna jika kelompok berbeda dalam hal etnis, agama, kepentingan politik, dan seterusnya sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk berdialog dan bersinergi secara kuat membangun solidaritas serta aktif melakukan kerja-kerja positif dan konstruktif bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pluralisme tidak bermaksud melebur berbagai identitas yang ada, tetapi merangkai dengan indah berbagai identitas itu demi tujuan kemanusiaan yang hakiki.

Berbeda dengan pluralitas sebagai *realitas faktual*, pluralisme adalah soal realitas kesadaran akan realitas faktual itu. Kesadaran berarti cara pandang, cara hidup, dan idealitas serta pengakuan akan realitas itu. Inilah yang diwariskan Islam dari berabad-abad yang lalu, baik secara doktrinal maupun praktek sejarah. Pengingkaran terhadap pluralitas adalah pengingkaran terhadap *sunatullah,* pengingkaran terhadap ajaran Islam.

Kedua, melakukan rekonsiliasi dan rehabilitasi terhadap korban-korban kekerasan atas nama agama. Karena, pada dasarnya yang membutuhkan peneguhan dan pengakuan identitas adalah mereka. Merekalah yang dipinggirkan, bahkan hendak dihilangkan. Identitas mereka yang selama ini tertutupi oleh kelompok-kelompok *mainstream* layak muncul dan diperlakukan sejajar dengan yang lain.

Dua hal ini kiranya penting dilakukan agar gelombang politik identitas yang secara massif digerakkan oleh kelompok-kelompok fundamentalis dapat dijinakkan sehingga tercipta kedamaian yang kita impi-impikan. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.***